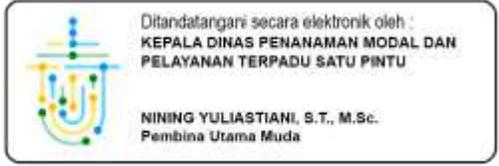




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1789 / PL / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;4. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan komputer2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	<ul style="list-style-type: none">- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPSTP	Dinas BMPR	Kanwil BPN	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5					- Hak Akses - dokumen Permohonan	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Persetujuan KKPR - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi - Menotifikasi ke Kanwil BPN					- Hak Akses - dokumen Permohonan	1 hari	Notifikasi permohonan	
3	- Menerima Notifikasi - Melakukan verifikasi - Melakukan rapat forum - memberikan pertimbangan teknis					Notifikasi permohonan PKKPR	20 HK	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
4	- Menerima Notifikasi - melakukan verifikasi - Memberikan pertimbangan pertanahan					Notifikasi permohonan PKKPR	20 HK	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
5	- Menerima notifikasi hasil verifikasi dari DBMPR dan Kanwil BPN - Menerbitkan PKKPR/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon					hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan PKKPR/ penolakan	
6	- Menerima notifikasi penerbitan PKKPR/penolakan - memberikan penilaian pelayanan					Penerbitan PKKPR/ penolakan	N/A	- PKKPR - penilaian pelayanan	